

**PERBANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP PERLINDUNGAN JAKSA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

TANIA MELANTIKA MASITA MALIY
NIM : 1312200088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**PERBANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP PERLINDUNGAN JAKSA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

TANIA MELANTIKA MASITA MALLY

NIM : 1312200088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**PERBANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP PERLINDUNGAN JAKSA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

TANIA MELANTIKA MASITA MALLY

NIM : 1312200088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERBANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP
PERLINDUNGAN JAKSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

TANIA MELANTIKA MASITA MALLY

NBI: 1312200088

Dosen Pembimbing:

Dr. Ahmad Sholikin Ruslie, S.H., M.H.

NPP. 20310210845

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERBANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP
PERLINDUNGAN JAKSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Oleh:

TANIA MELANTIKA MASITA MALLY

NBI: 1312200088

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan LULUS Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1634/ST/K/FH/XII/2025

Tanggal: 24 Desember 2025

TIM PENGUJI

Ketua : Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H.

NPP: 20310880149

Sekretaris : Dr. Endang Prasetywati, S.H., M.Hum.

NPP: 196001231986012001

Anggota : Dr. Merline Eva Lyanthi, SH., M.Kn.

NPP: 20310230880

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan



Dr. Yonita Arie Mangesti, S.H., M.H.

NPP : 20310190808

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tania Melantika Masita Mally
NBI : 1312200088
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern **“PERBANTUAN TENTARA NNASIONAL INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN JAKSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidaksesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Desember 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Tania Melantika Masita Mally

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tania Melantika Masita Mally
NBI : 1312200088
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern **“PERBANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN JAKSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Desember 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Tania Melantika Masita Mally

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tania Melantika Masita Mally

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Nim 1312200088

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya tulis berjudul:

**“PERBANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP
PERLINDUNGAN JAKSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA”**

Adalah karya saya sendiri bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepanjang sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain. Kecuali yang dikutip secara tertulis dalam naskah skripsi ini. Apabila ternyata naskah skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia skripsi ini dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 24 Desember 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Tania Melantika Masita Mally



UNIVERSITAS
17AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45
SURABAYA TELP. 031 593 1800-
(Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tania Melantika Masita Mally
NBI/ NPM : 1312200088
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/ ~~Tesis/ Disertasi/ Laporan~~
Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**"PERBANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP
PERLINDUNGAN JAKSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA"**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty - Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 1 Desember 2025



Yang Menyatakan,

Tania Melantika Masita Mally

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan YME, atas rahmat, petunjuk, dan kekuatan yang diberikan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, saya persembahkan karya ini kepada Ayah dan Ibu tercinta sebagai wujud terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah saya. Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada beliau berdua. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang selalu menjadi penguat dalam suka dan duka, serta kepada Bapak Dr. Ahmad Sholikin Ruslie, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu, bimbingan, serta kesabaran yang diberikan selama proses studi hingga penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan tulus, serta hangatnya persahabatan yang senantiasa menguatkan di saat lelah maupun ragu. Setiap tawa, cerita, dan perjuangan bersama telah menjadikan proses ini lebih berwarna dan bermakna. Untuk almamater tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terima kasih telah menjadi ruang tempat saya ditempa, bertumbuh, dan menemukan jati diri. Saya juga berharap agar skripsi ini dapat menjadi karya yang membawa manfaat, memberi sudut pandang baru, serta mampu mendorong semangat bagi siapa pun yang membacanya. Semoga tulisan ini menjadi langkah awal yang membuka peluang untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan terus berkarya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perbantuan Tentara Nasional Indonesia terhadap Perlindungan Jaksa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak.

Maka dari itu saya sebagai penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Tomy Michael S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Ahmad Sholikin Ruslie S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Sultoni Fikri S.IP., S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah dengan sabar memberikan segala bimbingan, perhatian, dan dukungan akademik yang telah diberikan kepada penulis selama masa studi hingga tersusunnya skripsi ini.
6. Kepada Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, atas segala ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik dan administratif yang telah diberikan kepada penulis selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Almarhum Bapak Melianus Mally tercinta. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah bapak berikan. Kepergian bapak menjadi kehilangan yang mendalam, sekaligus alasan terbesar penulis untuk terus berjuang meraih gelar sarjana.
8. Kepada Mama tercinta, Muslikha, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan keteguhan yang tak pernah putus. Dengan keikhlasan, Mama membimbing dan menguatkan penulis hingga menyelesaikan studi sarjana. Doa-doa Mama menjadi penopang utama dalam setiap perjuangan.
9. Kepada saudari-saudara penulis, Siti Malikah, Anggy Mally, dan Della Mally, terima kasih atas dukungan dan pengorbanan, baik materi maupun nonmateri, serta semangat yang senantiasa diberikan selama masa perjuangan ini.
10. Kepada Shifa Raisa Parsa dan teman-teman tercinta, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuan yang senantiasa menguatkan penulis hingga karya ini terselesaikan.
11. Terakhir, kepada diri sendiri, Tania Melantika Masita Mally. Terima kasih atas keteguhan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan proses ini. Keputusan untuk tetap bertahan hingga akhir merupakan pencapaian yang patut dihargai.

Oleh karena itu, saya sangat membuka diri terhadap setiap masukan serta kritik yang bersifat membangun sebagai upaya untuk menyempurnakan karya ini di masa yang akan datang. Harapan saya, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi sumbangsih kecil yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya, saya memohon semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan berkah, petunjuk, dan kemudahan dalam setiap langkah yang akan saya tempuh selanjutnya Aamiin.

Surabaya, 24 Desember 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini



Tania Melantika Masita Mally

NIM: 131220008

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji keabsahan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tugas perlindungan jaksa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025, dengan menempatkannya dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Analisis ini berangkat dari desain ketatanegaraan pascareformasi yang secara tegas memisahkan fungsi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menilai apakah perlindungan jaksa memenuhi parameter OMSP, khususnya terkait karakter ancaman, dasar kewenangan hukum, mekanisme kendali sipil, serta prinsip temporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa ancaman terhadap jaksa pada umumnya bersifat kriminal dan individual, berada dalam ranah penegakan hukum, sehingga tidak mencapai ambang ancaman luar biasa yang dapat membenarkan pelibatan militer. Selain itu, artikel ini menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 berpotensi melampaui batas kewenangan delegatif karena secara substantif memperluas peran TNI di luar koridor yang ditetapkan undang-undang. Perluasan tersebut mengaburkan batas konstitusional antara fungsi pertahanan dan keamanan domestik serta berisiko melemahkan prinsip supremasi sipil dalam negara hukum demokratis. Dengan demikian, pelibatan TNI dalam perlindungan jaksa tidak ditopang oleh dasar normatif yang memadai dan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam tata kelola hubungan sipil militer di Indonesia.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, Perlindungan Jaksa, OMSP, Supremasi Sipil, Negara Hukum

ABSTRACT

This study examines the legitimacy of the involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in the protection of prosecutors under Presidential Regulation No. 66 of 2025, placing it within the framework of Military Operations Other Than War (OMSP) under Law No. 3 of 2025. This analysis departs from the post-reform constitutional design that explicitly separates the functions of national defense and domestic security. This research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach to assess whether the protection of prosecutors meets the parameters of OMSP, particularly regarding the character of the threat, the basis of legal authority, civilian control mechanisms, and the principle of temporality. The results of the study indicate that threats against prosecutors are generally criminal and individual in nature, falling within the realm of law enforcement, and therefore do not reach the threshold of extraordinary threats that could justify military involvement. Furthermore, this article asserts that Presidential Regulation No. 66 of 2025 has the potential to exceed the limits of delegative authority because it substantively expands the role of the TNI beyond the corridors established by law. This expansion blurs the constitutional boundaries between defense and domestic security functions and risks weakening the principle of civilian supremacy in a democratic state governed by law. Thus, the involvement of the TNI in protecting prosecutors is not supported by an adequate normative basis and has the potential to give rise to deviations in the governance of civil-military relations in Indonesia.

Keywords: Indonesian National Armed Forces, Prosecutor's Protection, OMSP, Civil Supremacy, Rule of Law

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xx
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1 Manfaat Teoritis	3
1.4.2 Manfaat Praktis	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Jenis Penelitian.....	4
1.5.2 Metode Pendekatan	5
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	5
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	6
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep Kedudukan dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	9
2.2 Konsep Perlindungan Jaksa dan Peran Polisi Negara Republik Indonesia	9
2.3 Konsep Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Perlindungan Jaksa menurut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025	11
2.4 Konsep Supremasi Sipil dan Prinsip Legalitas.....	13
BAB III PEMBAHASAN.....	17
3.1 Pengaturan Tugas Pokok dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025	17
3.1.1 Kedudukan Konstitusional Tentara Nasional Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan dan Prinsip Supremasi sipil	19
3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam Konteks Pertahanan	21
3.1.3 Ruang Lingkup dan Batasan OMSP dalam Undang-Undang	

Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia	28
3.1.4 Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam Hubungan Kelembagaan dengan Polri dan Kejaksaan.....	3
3.2 Perlindungan Jaksa sebagai Tugas Perbantuan Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.....	37
3.2.1 Pengaturan Perlindungan Jaksa dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2021 dan Undang-Undang No 2 Tahun 2022	39
3.2.2 Tinjauan Normatif Perbantuan TNI terhadap Perlindungan Jaksa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025	48
3.2.3 Alasan dan Urgensi Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Perlindungan Jaksa.....	56
3.2.4 Potensi Konflik Norma antara Perpres No 66 Tahun 2025, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, dan UUD NRI 1945	63
3.2.5 Keselarasan atau Penyimpangan terhadap Prinsip Supremasi Sipil Dan Negara Hukum	70
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81